



LAPORAN KINERJA

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022



STASIUN PSDKP CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

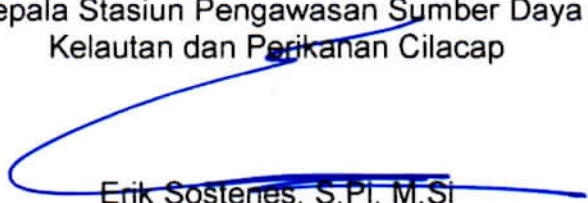
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2022 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Tahun 2022 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap (UPT Stasiun PSDKP Cilacap).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2022. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Cilacap dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Cilacap, 20 Januari 2023

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap


Erik Sosteres, S.PI, M.Si
NIP. 19850316 200701 1 006

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan UPT Stasiun PSDKP Cilacap, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*); dan
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Dalam penerapannya, Stasiun PSDKP Cilacap hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*, sedangkan untuk *Stakeholders Perspective* tidak digunakan karena Stasiun PSDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sebagai implikasi penerapan BSC dalam upaya perencanaan Tahun 2022, Sasaran Strategis UPT Stasiun PSDKP Cilacap bermuara pada 7 Sasaran Strategis (SS), yaitu: (1) Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan; (2) Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan; (3) Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif; (4) Terselenggaranya

Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; (5) Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; (6) Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif; dan (7) Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2022 sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 25 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap. Pencapaian IKU Tahun 2022, dari 25 IKU level UPT Stasiun PSDKP Cilacap seluruh IKU berwarna hijau (terrealisasi 100%) dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,18%.

Realisasi anggaran tahun 2022 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap sampai 31 Desember 2022 sebesar **99,66%** atau sebesar Rp **25.681.867.837,-** (*Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. **25.768.557.000,-** (*Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi 108,18% dan realisasi sebesar 99,66%, maka diperoleh efisiensi sebesar 1,57. Melalui Laporan Kinerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2022.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	x
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Data Umum Organisasi	2
D. Isu Aktual	5
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	5
PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	8
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	12
AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	15
1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan.	15
2. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan Yang Sesuai Ketentuan	26
3. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	35
4. Sasaran Kegiatan 3.2 : Terselenggaranya Operasi Armada SDKP yang efektif.....	37
5. Sasaran Kegiatan 3.3 : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	44
6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	49
7. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	49
PENUTUP.....	81

A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
LAMPIRAN	83

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2022	9
Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2022	13
Tabel 4. Pelaku usaha Jenis Ikan yang dilindungi yang di Periksa Kepatuhan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	16
Tabel 5. Pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang diperiksa Kepatuhan	20
Tabel 6. Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang di Periksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya	21
Tabel 7. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	24
Tabel 8. Perbandingan capaian IKU Ke-1 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	24
Tabel 9. Perbandingan pencapaian IKU Ke-1 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	25
Tabel 10. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor penangkapan ikan	26
Tabel 11. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pembudidaya ikan	28
Tabel 12. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan ikan	30
Tabel 13. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh pengawas perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengangkutan&pemasaran ikan	32
Tabel 14. Perbandingan capaian IKU Ke-2 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	34
Tabel 15. Perbandingan pencapaian IKU Ke-2 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	34
Tabel 16. Perbandingan capaian IKU Ke-3 Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	35
Tabel 17. Perbandingan pencapaian IKU Ke-3 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	37
Tabel 18. Perbandingan capaian IKU Ke-4, IKU Ke-5 dan IKU Ke-6.....	37
Tabel 19. Perbandingan pencapaian IKU Ke-4 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	41
Tabel 20. Capaian Hari Operasi dan Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa oleh Speedboat/RIB/Rubberboat Stasiun PSDKP Cilacap	42
Tabel 21. Perbandingan pencapaian IKU Ke-5 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	43
Tabel 22. Perbandingan pencapaian IKU Ke-6 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	44
Tabel 23. Perbandingan capaian IKU Ke-7 dan IKU Ke-8	45

Tabel 24. Perbandingan pencapaian IKU Ke-7 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022.....	46
Tabel 25. Rincian kegiatan perawatan pada IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP.....	47
Tabel 26. Perbandingan pencapaian IKU Ke-8 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022.....	48
Tabel 27. Capaian IKU pada SK 4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif.....	49
Tabel 28. Kasus Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	50
Tabel 29. Perbandingan capaian IKU Ke-9 Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	50
Tabel 30. Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%).....	51
Tabel 31. Perbandingan capaian IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	52
Tabel 32. Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%).....	52
Tabel 33. Perbandingan capaian IKU Ke-11 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	53
Tabel 34. Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%).....	54
Tabel 35. Perbandingan capaian IKU Ke-12 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	55
Tabel 36. Persentase Efektivitas penganan sanksi administratif lingkup organisasi setara ditjen PSDKP.....	55
Tabel 37. Perbandingan capaian IKU Ke-13 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	56
Tabel 38. Perbandingan pencapaian IKU Ke-13 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022.....	58
Tabel 39. Perbandingan capaian IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	59
Tabel 40. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022.....	61
Tabel 41. Perbandingan capaian IKU Ke-15 Nilai WBK Stasiun PSDKP Cilacap.....	62
Tabel 42. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022.....	63
Tabel 43. Perbandingan capaian IKU Ke-16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	64
Tabel 44. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022.....	64
Tabel 45. Perbandingan capaian IKU Ke-18 Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	65
Tabel 46. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022.....	66

Tabel 47. Perbandingan capaian IKU Ke-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja.....	67
Tabel 48. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	68
Tabel 49. Perbandingan capaian IKU Ke-19 Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik.....	68
Tabel 50. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	69
Tabel 51. Perbandingan capaian IKU Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya.....	70
Tabel 52. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	71
Tabel 53. Perbandingan capaian IKU Ke-22 Tingkat Kepatuhan PBJ Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya.....	71
Tabel 54. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	72
Tabel 55. Perbandingan capaian IKU Ke-22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dengan tahun sebelumnya	73
Tabel 56. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	74
Tabel 57. Perbandingan capaian IKU Ke-23 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	74
Tabel 58. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	75
Tabel 59. Perbandingan capaian IKU Ke-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	76
Tabel 60. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	76
Tabel 61. Perbandingan capaian IKU Ke-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	77
Tabel 62. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022	78
Tabel 63. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap periode Januari-Desember 2022.....	80
Tabel 64. Penghargaan yang Diterima Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2022.....	80

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap	4
Gambar 2. Sebaran Lokasi Unit Usaha Perikanan yang Diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.....	23
Gambar 3. Sebaran lokasi pemeriksaan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan.....	27
Gambar 4. Grafik sebaran lokasi pemeriksaan pelaku usaha subsektor pembudidaya ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan	29
Gambar 5. Grafik sebaran lokasi pemeriksaan pelaku usaha subsektor pengolahan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan	31
Gambar 6. Grafik Lokasi Sebaran pelaku usaha pengangkutan dan pemasaran ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan.....	33
Gambar 7. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	58
Gambar 8. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	60
Gambar 9. Efisiensi melalui aplikasi SMART DJA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap tahun 2022 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Cilacap untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good Governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Cilacap menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;

- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a) Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Pelaksana Koordinasi Urusan Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

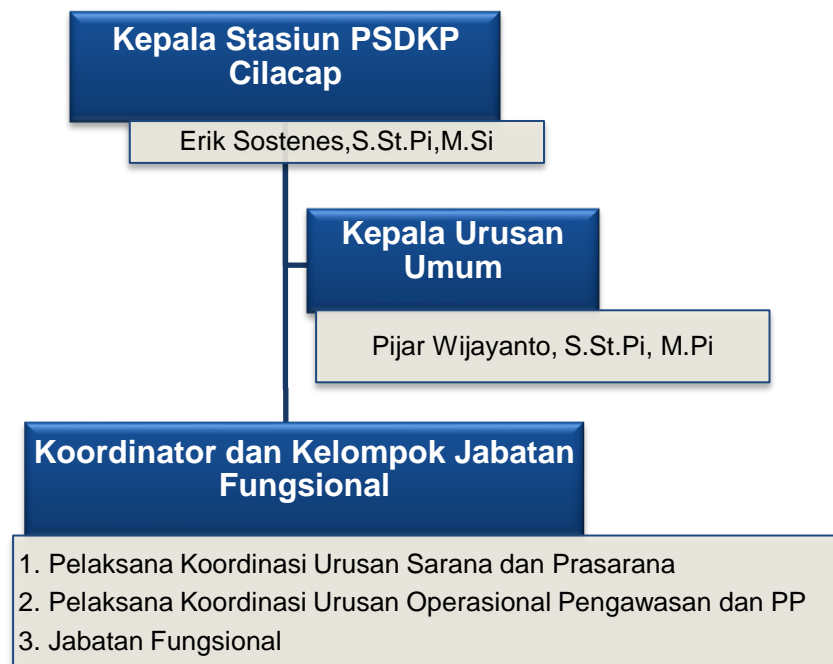
d) Pelaksana Koordinasi Urusan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e) Jabatan Fungsional

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada tahun 2022 dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Stasiun PSDKP Cilacap merupakan salah satu Satker dari KKP yang diusulkan untuk mengikuti penilaian WBK nasional oleh Kemenpan RB; dan
- b. Maraknya pelanggaran SPKP di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap dan telah dilakukan verifikasi oleh Pengawas Perikanan, namun belum menjadi ukuran kinerja.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2022.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024; (2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan (3) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2022.

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP NOMOR 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan

selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP; dan
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speedboat* dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasi; dan
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*); dan
 - d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”; dan
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; serta (4) Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap yang telah ditetapkan pada bulan Januari 2022 terdiri dari: Sasaran Kegiatan (SK) berjumlah 7 (Tujuh) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berjumlah 26 (Dua puluh enam). Namun pada tahun berjalan terjadi perubahan kebijakan penganggaran dan perencanaan kinerja dalam mendukung kinerja organisasi, sehingga dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja pada 1 (Satu) Indikator Kinerja dan 5 (Lima) target Indikator Kinerja seperti Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100 Tetap
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100 Tetap
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	87 Tetap
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	85 Ada Perubahan
		ISK3.2.2	Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	85 Ada Perubahan
		ISK3.2.3	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	90 Tetap
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100 Tetap
		ISK3.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100 Tetap
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	75 Ada Perubahan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	KET
	perikanan yang efektif	ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	46,5	Ada Perubahan
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	46,5	Ada Perubahan
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	80	Tetap
		ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	80	Dihilangkan/ dihapuskan
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP					
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	80	Tetap
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	80	Tetap
		ISK5.1.3	Nilai WBK Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	75	Tetap
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	77	Tetap
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	90	Tetap
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	Tetap
		ISK5.1.7	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	Tetap

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	KET
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	75	Tetap
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	75	Tetap
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	86	Tetap
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	Tetap
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	89	Tetap
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	81	Tetap

Sesuai dengan Tabel 1 di atas bahwa telah terjadi penyesuaian terhadap 1 (Satu) Indikator Kinerja dan 5 (Lima) target Indikator Kinerja, dimana penyesuaian Indikator Kinerja tersebut terdapat pada IKU “Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap” yang dihapuskan/dihilangkan, karena adanya penyesuaian pada perencanaan dan penganggaran akibat kebijakan terhadap penanggulangan Covid-19.

Sedangkan penyesuaian terhadap target terdapat pada IKU: (1) “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” menjadi 85, (2) “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas” menjadi 85, (3) “Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)” menjadi 75, (4) “Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)” menjadi 46,5, dan (5)

“Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)” menjadi 46,5.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses pada website www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2022 Stasiun PSDKP Cilacap telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 25 (dua puluh lima) IKU dengan nilai NKO sebesar 108,18%. Capaian kinerja Tahun 2022 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi	Persentase Capaian (%)
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100	100	100,00 %
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100	100	100,00 %
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	3. Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	87	100	114,94 %
Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	4. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	85	85,58	100,68%
	5. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	85	100	117,65%
	6. Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	90	100	111,11%
Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	7. Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100	100	100,00%
	8. Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100	100	100,00%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi	Persentase Capaian (%)
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	9. Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	75	90	120,00%
	10. Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	46,5	100	120,00%
	11. Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	46,5	66,7	120,00%
	12. Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	80	100	120,00%
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP16	13. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	80	87,90	109,88%
	14. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	80	98,31	120,00%
	15. Nilai WBK Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	75	90,08	120,00%
	16. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	77	80,17	104,12%
	17. Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	90	97,28	108,09%
	18. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	26,17	120,00%
	19. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)	1	1	100,00%
	20. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	75	100	120,00%
	21. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	75	100	120,00%
	22. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	86	98,06	114,02%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi	Persentase Capaian (%)
	23. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	100,00	120,00%
	24. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	89	94,44	106,11%
	25. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	81	85,36	105,38%

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor \geq 100)
2		Hati-hati ($80 \leq$ Skor $<$ 100)
3		Buruk (Skor $<$ 80)
4		Belum Ada Skor

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pada Periode Tahun 2022 Stasiun PSDKP Cilacap telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-1 “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap”**. Ukuran keberhasilan IKU Ke-1 ini diperoleh dari capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.

Kegiatan utama pada IKU ini yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2022 dibagi ke dalam 4 (empat) sub sektor kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Unit Usaha Jenis Ikan yang di Lindungi yang di Periksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Capaian pengawasan unit usaha jenis ikan dilindungi yang diperiksa pada tahun 2022 yaitu 7 unit pelaku usaha. Rincian pelaku usaha jenis ikan yang dilindungi sebagaimana Tabel 7 dibawah ini:

Tabel 3. Pelaku usaha Jenis Ikan yang dilindungi yang di Periksa Kepatuhan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
1	PT. Janicotama Persada Cilacap	PT. Janicotama sudah memiliki NIB 8120212083004, KBLI 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan ikan), SKP No. 20998/SKP/I2022 s.d 14 Januari 2024, mengolah sirip hiu menjadi potongan sirip hiu kering. Jenis hiu yang diolah tidak termasuk jenis dalam daftar <i>Appendix CITES</i> dan bukan termasuk jenis yang dilarang sehingga dapat diproses lebih lanjut menjadi produk olahan.
2	Muslimin	H. Muslimin mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 2701220023104. NIB tersebut An. Muhammad Sodik yang merupakan adik dari H. Muslimin. Adapun kode KBLI dalam NIB tersebut adalah 47215 (Perdagangan eceran hasil perikanan). Usaha H. Muslimin perlu penambahan kode KBLI 03151 (Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/ atau Termasuk dalam <i>Appendiks CITES</i>). Hasil pemeriksaan jenis ikan yang sedang dijemur oleh H.Muslimin, terdapat jenis ikan yang masuk kedalam <i>Appendix IV CITES</i> . Jenis-jenis ikan tersebut antara lain sirip pari kikir sebanyak 30 buah, sirip pari lyongbun 100 buah, sirip pari gitar 34 buah dan sirip hiu lanjaman 50 buah. Ikan-ikan tersebut diperoleh dari kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikannya di TPI Tasikagung. H. Muslimin belum memiliki SIPJI dan SAJI-DN, yang merupakan dokumen wajib dalam pemanfaatan dan pengangkutan jenis ikan yang dilindungi penuh/ terbatas/ masuk dalam <i>appendiks CITES</i> .
3	CV. Maju Berkembang Jaya	CV. Maju Berkembang Jaya mempunyai NIB 1211000520859 dengan KBLI 03151 (penangkapan/pengambilan ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam <i>appendiks CITES</i>). Hasil pemeriksaan

No	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		mengolah dan memasarkan sirip dan kulit ikan pari/hiu. Dalam hal pemanfaatan jenis ikan dilindungi penuh / terbatas / masuk dalam <i>appendiks CITES</i> , CV. Maju Berkembang Jaya belum tertib karena belum mempunyai SIPJI dan SAJI.
4	UD. Mitra Karya Mandiri Kab. Rembang	UD. Mitra Karya Mandiri mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120212111941 An. Mugiyono dengan kode KBLI 03151 (penangkapan/pengambilan ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam <i>appendiks CITES</i> dan kode KBLI 03155 (penangkapan/pengambilan Echinodermata yang dilindungi dan/atau termasuk dalam <i>appendiks CITES</i> . Dokumen perizinan lain yang dimiliki adalah Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan dalam negeri No. 92/1/KKP/2021 yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2021 dan masa berlaku selama 5 tahun.
5	PT. THT Maju Indonesia Kab. Pati	PT. THT Maju Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan ikan dengan status modal PMA Cina dengan NIB. 91202003760312 dan KBLI 46208, 10219, 03151, 03271, 10211, 46205, 46208, 10211, 10291, 10297, 10219, 46324,46206. Adapun alamat yang tercantum dalam NIB adalah Kawasan Industri Agroforestry Terpadu (KIAT) Regaloh, Jl. Raya Tlogowungu Lahar Ds. Regaloh Kec. Tlogowungu Kab. Pati. PT.THT Maju Indonesia mempunyai SKP No. 21500/33/SKP/KR/IVI/2022/ikan kering (berlaku), 21497/33/SKP/KR/II/2022/gelembung ikan kering (berlaku), 21501/33/SKP/KR/II/2022/cumi - cumi kering (berlaku), 21499/33/SKP/KR/II/2022/udang kering (berlaku), 21495/33/SKP/KR/II/2022/sirip hiu kering, kulit hiu kering, ekor hiu kering (berlaku), 21496/33/SKP/KR/II/2022/ teripang kering, 21494/33/SKP/KR/II/2022 / sirip pari kering, kulit pari kering, ekor pari kering (berlaku). PT. THT Maju Indonesia sudah mengurus SIPJ1 perdagangan dan SIPJI Luar Negeri,namun SIPJI tersebut belum jadi. Hasil audiensi dengan Ditjen PRL via email tanggal 27 Juni 2022, untuk SIPJI perdagangan sedang dalam proses di Biro Hukum KKP dan untuk SIPJI luar negeri sedang proses di Setjen

No	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		KKP. Dalam pemeriksaan ditemukan 8 sirip pari kikir yang termasuk spesies Apendix II.
6	UD Samudra Jaya	UD. Samudra Jaya Semarang bergerak dibidang pembekuan ikan milik Agus Sumartio, dengan NIB 8120002872175, NPWP 067780627518000. KBLI 03151, 10213, 10293, 03271. Nomor SIPJI 165/1//KKP/2021 dan 166/1//KKP/2021 sampai tanggal 07 Juli 2026. UD Samudra jaya belum melaksanakan kegiatan mengolah/ pengumpulan/ perdagangan Kuda Laut.

Dalam mendukung kegiatan pengawasan jenis ikan yang dilindungi diperlukan anggaran sebesar Rp.11.730.200,- atau 97,85%, dari total anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.11.988.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pengawasan terhadap 7 pelaku usaha, sehingga beban anggaran untuk 1 (satu) pelaku usaha adalah Rp.1.675.743,-. Jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut telah dikurangi dengan anggaran yang terkena *Automatic Adjustment (AA)* sebesar Rp.10.650.000,- sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19.

2. Pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan

Capaian pengawasan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya pada tahun 2022 yaitu 3 unit pelaku usaha. Rincian pelaku usaha produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Pelaku Usaha Produk dan Jasa Kelautan yang di Periksa Kepatuhan
Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
1	Kelompok Usaha Garam Rakyat (Kugar) Jagad Kidul	Kegiatan pengelolaan jasa kelautan di Desa Miritpetikusan dilakukan sejak tahun 2018 oleh Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) Jagad Kidul yang dikelola oleh Bapak Puji Santoso sebagai Ketua Kelompok yang berada pada lahan tanah Desa Miritpetikusan seluas 2 ha pada koordinat 7°47'026" LS 109°45'55" BT. Pengelolaan lahan ini

No	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		<p>didukung oleh Kepala Desa Miritpetikusan Bapak Ahmad Mafangil untuk pemberdayaan nelayan pesisir dan menambah penghasilan mereka sehingga diberikan ijin untuk memanfaatkan lahan desa yang berada dipesisir laut. Usaha ini telah memiliki NIB dengan No.: 24112110009138 dengan jenis produksi : garam konsumsi beriodium; dan dengan judul KBLI Industri Pengolahan Garam. Kugar Jagad Kidul ini juga telah memiliki SNI 3556.2016 dan Sertifikat Halal No: LPPOM15060083841221 dari MUI Jateng.</p>
2	Kugar. Cirat Segoro Renges-13 (CSR-13)	<p>Kegiatan pengelolaan jasa kelautan ini merupakan kegiatan Ekstraksi Garam sekaligus Wisata Edukasi Garam yang terletak di Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada koordinat 7°48' 52" LS 109°47' 25" BT. Pengelolaan Jasa Kelautan ini hanya memiliki luasan tanah 2 ha yang mana adalah tanah hak milik pribadi Bapak Budi Santoso. Kegiatan ini telah memiliki NIB dengan No: 0220209830554 dan Sertiikat Halal No: LPPOM 15060083411121 dari MUI Jateng.</p>
3	Kugar. Pendowo Limo	<p>Pengelolaan Jasa Kelautan berupa pengolahan garam di Kugar Pendowo Limo yang beranggotakan lima (5) orang yaitu : Bpk. Marsino, Bpk. Rubiyanto, Bpk. Musmidi, Bpk. Suhadi dan Bpk. Saring Atmoji. Kugar Pendowo Limo memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil No: IUMK/78/GRB/2019 yang diterbitkan oleh Kecamatan Grabag. Adapun NIB dan NPWP sedang dalam pengurusan dibantu oleh Penyuluh Perikanan Kabupaten Purworejo. Kugar ini terletak di Pantai Jetis Desa Patutrejo, Kecamatan Grabag, KabupatennPurworejo Provinsi Jawa Tengah terletak pada koordinat 7°50'59.6" LS 109°53'54" BT dengan luasan area kurang dari 2 ha sehingga termasuk dalam skala usaha Mikro.</p>

Dalam mendukung kegiatan pengawasan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan diperlukan anggaran sebesar Rp.9.061.650,- atau 100%, dari total

anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.9.062.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pengawasan terhadap 3 pelaku usaha, sehingga beban anggaran untuk 1 (satu) pelaku usaha adalah Rp.3.020.666,-. Jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut telah dikurangi dengan anggaran yang terkena *Automatic Adjustment (AA)* sebesar Rp.8.665.000,- sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19.

3. Pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang diperiksa Kepatuhan

Capaian pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya pada tahun 2022 sebanyak 11 unit pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel 8 dibawah ini:

Tabel 4. Pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang diperiksa Kepatuhan

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
1	PT. Bima Sena Power Batang Indonesia Batang	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
2	PT. Taman Safari Indonesia	Wisata Pertunjukkan Lumba-Lumba dan Kebun Binatang Mini
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang,	Dermaga / jetty
4	PLTU Tanjung Jati B Unit 1 dan 2 Jepara	Dredging (pengerukan material dasar laut)
5	PT. Pemasang Aji Jaya Maritimindo	Proses reklamasi yang diperuntukan untuk kegiatan Docking di Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemasang
6	Ibu Kristina (Bumdes Semar Mesem)	Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir terutama di Pantai Pangi diperuntukan untuk kegiatan wisata pantai dan warung makan
7	PLTU PT PJB Pacitan	Pembangkit Listrik Jawa Bali
8	CV Kamikita Bangun Persada Kec. Bergas	Kontraktor, alamat tidak sesuai. Ijin KBLI 68111 dengan alamat di jalan Sapen Raya Pudukayung, Banyumanik Semarang

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
9	Bintang Petro Nusantara Kab. Kendal	Alamat di NOB tidak sama dengan hasil pemeriksaan. KBLI 68111. tetapi bergerak di bidang jasa dalam kegiatan pemanfaatan pesisir di Kulon Progo DIY dan masih dalam wacana.
10	Kura Kura Resort	Resort
11	PT Forest Bridge Venture Semarang	Usha bergerak dalam jasa pengadaan furniture ke Eropa dan Amerika. Tidak sesuai dengan KBLI 68111 yang tertera di NIB.

Dalam mendukung kegiatan pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut diperlukan anggaran sebesar Rp.21.553.900,- atau 99,87%, dari total anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.21.583.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pengawasan terhadap 11 pelaku usaha, sehingga beban anggaran untuk 1 (satu) pelaku usaha adalah Rp.1.959.445,-. Jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut telah dikurangi dengan anggaran yang terkena *Automatic Adjustment (AA)* sebesar Rp. 5.067.000,- sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19.

4. Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Capaian pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya pada tahun 2022 yaitu 14 unit pelaku usaha. Rincian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana tabel 9 dibawah ini:

Tabel 5. Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang di Periksa Kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
1	PT. Indoflora Cipta Mandiri	Pencemaran
2	PT.Kilang Pertamina International RU IV Cilacap	Pencemaran berupa tumpahan minyak dari PT. Kilang Pertamina International RU IV Cilacap
3	Tirta Mina Sari	Pencemaran akibat adanya usaha budidaya pembesaran ikan air payau yaitu udang Vaname
4	CV. Panen Sehat Sejahtera	Pencemaran
5	CV. Daun Prima	Pencemaran
6	PT. Sinar Mutiara Abadi	Dokumen perizinan terkait pengelolaan limbah dan IPAL
7	PT. karya Mina Putra	Dokumen perizinan terkait pengelolaan limbah dan IPAL
8	PT. Insan Citra Prima Sejahtera	Dokumen perizinan terkait pengelolaan limbah dan IPAL
9	CV. Pasti Lancar	Dokumen perizinan terkait pengelolaan limbah dan IPAL
10	PT. Kelola Mina Laut Rembang	Dokumen perizinan terkait pengelolaan limbah dan IPAL
11	PT. Laut Kembar Sejati Rembang	Belum memiliki dokumen perizinan terkait pengelolaan limbah dan IPAL
12	PT. Holi Mina Jaya Rembang	Dokumen perizinan terkait pengelolaan limbah dan IPAL
13	PT. Bluesea Seafood Indonesia	Dokumen perizinan terkait pengelolaan limbah dan IPAL
14	PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	Pencemaran terkait pengelolaan limbah dan IPAL

Dalam mendukung kegiatan pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya diperlukan anggaran sebesar Rp.33.439.620,- atau 99,33%, dari total anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.33.666.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pengawasan terhadap 14 pelaku usaha, sehingga

beban anggaran untuk 1 (satu) pelaku usaha adalah Rp.2.388.544,-. Jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut telah dikurangi dengan anggaran yang terkena *Automatic Adjustment (AA)* sebesar Rp.19.291.000,- sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19.

5. Pengawasan Unit Usaha Perikanan yang di Awasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*)

Rincian kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan yang di awasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2. Sebaran Lokasi Unit Usaha Perikanan yang Diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak

Capaian pengawasan unit usaha perikanan yang di awasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2022 sebanyak 57 pelaku usaha, dengan variasi ukuran kapal penangkap ikan antara 1-10 *gross ton*. Dari keseluruhan pelaku usaha tersebut tidak ditemukan indikasi penggunaan bahan peledak, bahan bius, bahan beracun, serta penggunaan alat tangkap yang berbahaya dan membahayakan.

Dalam mendukung kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan yang di awasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak diperlukan anggaran sebesar Rp.44.603.166,- atau 99,90%, dari total anggaran yang dialokasikan

sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.44.648.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pengawasan terhadap 57 pelaku usaha, sehingga beban anggaran untuk 1 (satu) pelaku usaha adalah Rp.782.511,-. Jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut telah dikurangi dengan anggaran yang terkena *Automatic Adjustment (AA)* sebesar Rp.37.627.000,- sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19.

Untuk mengukur capaian IKU Ke-1 dari subsektor 4 (empat) pengawasan diatas, dilakukan dengan tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dengan rincian sebagaimana tabel 4 berikut.

Tabel 6. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas (SPT)	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Setelah dilakukan perhitungan, capaian IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dan perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 7. Perbandingan capaian IKU Ke-1 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020 - 2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-1 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	-	-	95	100	100	100	-

Capaian IKU Persentase pelaku usaha kelautan yang di periksa kepatuhannya pada tahun 2022 adalah 100%, capaian ini sesuai dengan target yang telah

ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2021 telah terjadi kenaikan dari target capaian sebesar 5%.

IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU baru yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-1 tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi;
2. Pemerintah pusat dan daerah telah aktif dalam penggalakan sosialisasi peraturan dan kebijakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung;
3. Telah diselenggarakan Bimtek untuk peningkatan kompetensi para pengawas perikanan dan pengawas kelautan, baik Bimtek secara luring maupun daring; serta
4. Pelaku usaha patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Sedangkan dalam pelaksanaan capaian IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan antara organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 8. Perbandingan pencapaian IKU Ke-1 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

Stasiun PSDKP Cilacap memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 33 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan pada unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) kebutuhan Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Cilacap sebanyak 51 Orang.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien, dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan oleh Stasiun PSDKP Cilacap dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

2. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan Yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU yaitu **IKU Ke-2 “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap”**. Capaian pada IKU ini diperoleh dari hasil pengukuran agresi 4 (empat) Sub-IKU, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 11 berikut:

Rincian capaian 4 Sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan

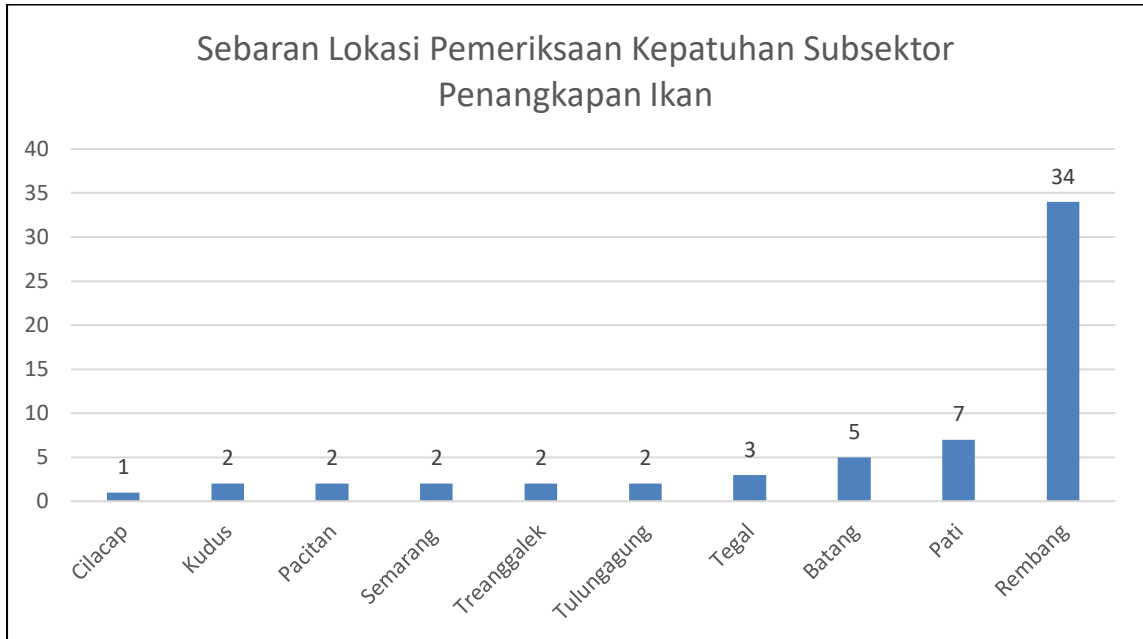
Capaian kepatuhan subsektor penangkapan ikan salah satunya diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan oleh pengawas perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor penangkapan ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	-Surat Pemberitahuan -SPT -Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	-Berita Acara Pemeriksaan -Formulir Pemeriksaan

3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Presentase sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2022 sebagaimana dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Sebaran lokasi pemeriksaan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan

Capaian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2022 sebanyak 60 pelaku usaha, yang didominasi oleh pelaku usaha dengan kode KBLI 03111 (Penangkapan pisces/ikan bersirip di laut) dan 03113 (Penangkapan Molusca di laut). Sekitar 54 pelaku usaha telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan, dan sisanya masih harus melengkapi perizinan berusaha Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB).

Bahwa dalam mendukung capaian Sub IKU ini diperlukan anggaran sebesar Rp.425.838.497,- atau sebesar 99,64 dari 60 pelaku usaha/KBLI yang harus diawasi kepatuhannya dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan rencana Aksi sebesar Rp. 427.359.000,-. Jumlah anggaran tersebut telah di kurangi, karena terkena *Automatic Adjustment (AA)* sebesar Rp.311.841.000,- dari

RP.739.200.000,- atau sebesar 40,00%, sesuai kebijakan pemerintah terkait pandemi *Covid-19*.

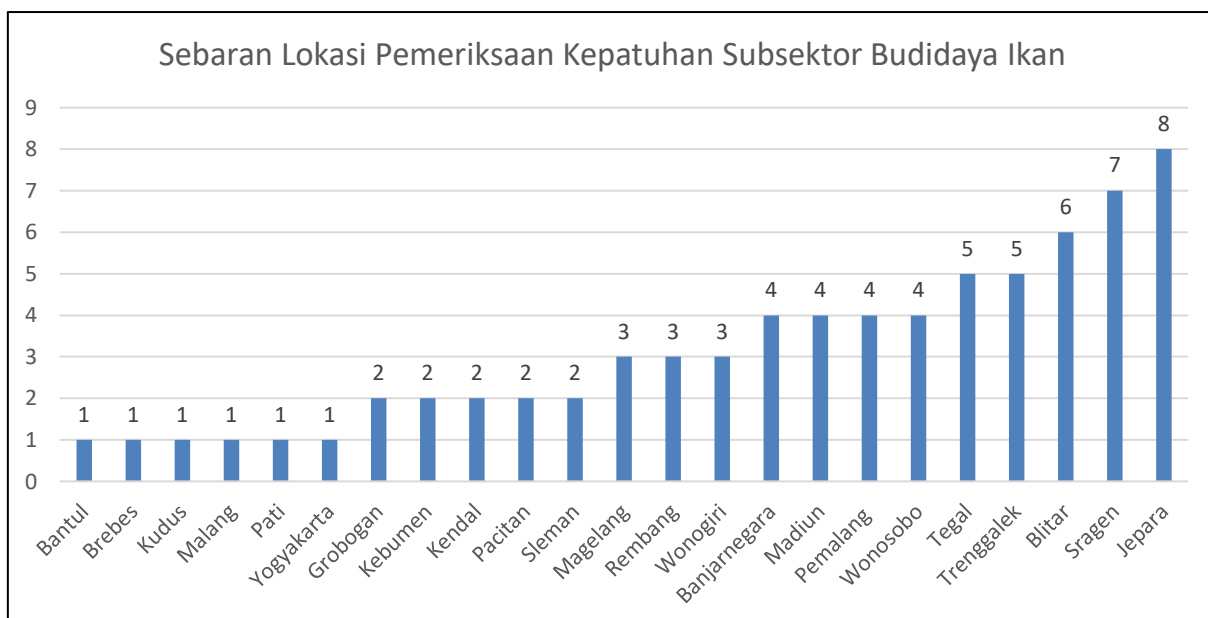
2. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan

Capaian kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pembudidayaan ikan oleh pengawas perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI pembudidayaan ikan dapat dilihat pada Tabel 15 berikut:

Tabel 10. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pembudidayaan ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	-Surat Pemberitahuan -SPT -Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	-Berita Acara Pemeriksaan -Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan dilakukan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembudidayaan ikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 66B, yang menyatakan pelaksanaan tugas pengawas perikanan dilakukan di sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan serta area pembudidayaan ikan. Sebaran lokasi pemeriksaan usaha subsektor pembudidayaan ikan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Grafik sebaran lokasi pemeriksaan pelaku usaha subsektor pembudidaya ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan

Capaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2022 sebanyak 72 pelaku usaha. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa beberapa pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), tidak menggunakan pakan yang terdaftar di KKP, dan belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Selanjutnya telah di rekomendasikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi seluruh syarat perizinan berusaha.

Bahwa dalam mendukung capaian Sub IKU ini diperlukan anggaran sebesar Rp.300.095.300,- atau sebesar 96,55%, dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.310.824.000,-. Jumlah Anggaran tersebut telah di kurangi oleh anggaran yang terkena *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp.209.176.000,- dari Rp.520.000.000,- atau sebesar 25,87%, sesuai kebijakan pemerintah terkait pandemi *Covid-19*.

3. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan

Capaian kepatuhan subsektor pengolahan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh pengawas perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi

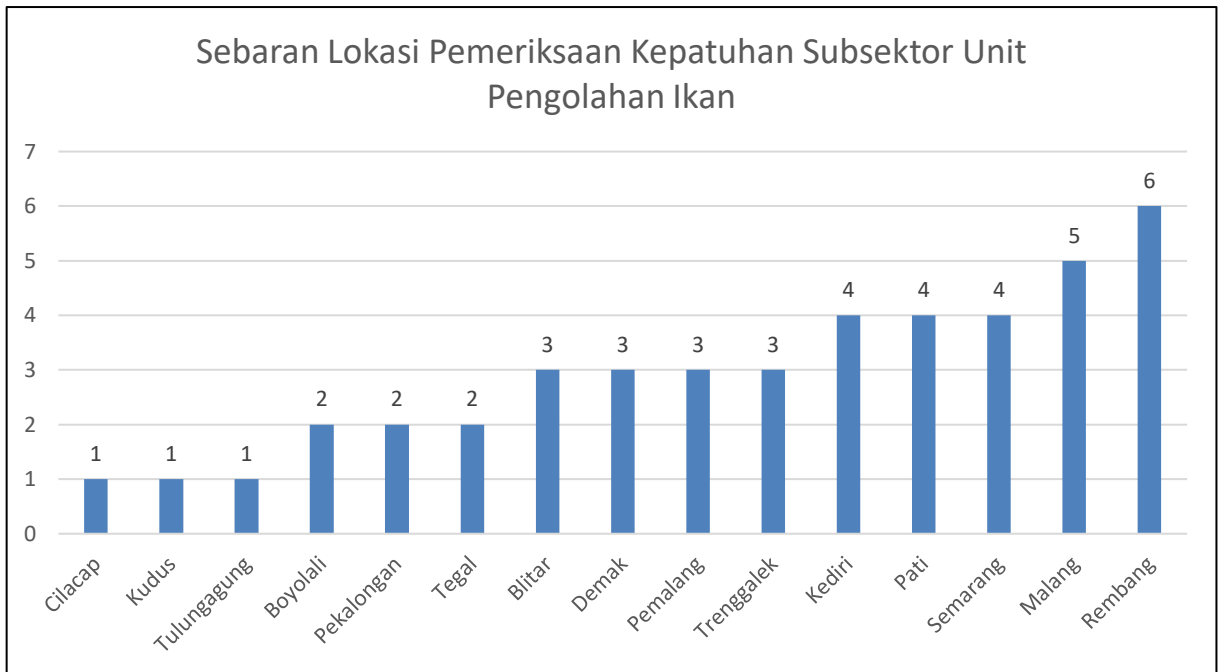
penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengolahan ikan dapat dilihat pada Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 11. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	-Surat Pemberitahuan -SPT -Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	-Berita Acara Pemeriksaan -Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSPD)
Jumlah Nilai		1	

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala mikro, menengah dan besar. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang mengekspor produk perikanan.

Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambah Berbahaya (BTB). Sebaran lokasi pemeriksaan unit pengolahan ikan yang telah dilakukan pemeriksaan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Grafik sebaran lokasi pemeriksaan pelaku usaha subsektor pengolahan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan

Capaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2022 sebanyak 44 pelaku usaha/perusahaan. Sekitar 25 pelaku usaha telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan, dan sisanya masih harus melengkapi perizinan berusaha HACCP, SAJI, dan penambahan KBLI. Selanjutnya telah di rekomendasikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi seluruh syarat perizinan berusaha.

Bahwa dalam mendukung capaian Sub IKU ini diperlukan anggaran sebesar Rp.73.521.350,- atau sebesar 99,87%. dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.73.614.000,- Jumlah Anggaran tersebut telah di kurangi terkena *Automatic Adjustment (AA)* sebesar Rp.23.918.000,- dari Rp.97.532.000,- atau sebesar 24,52% sesuai kebijakan pemerintah terkait pandemi *Covid-19*.

4. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan

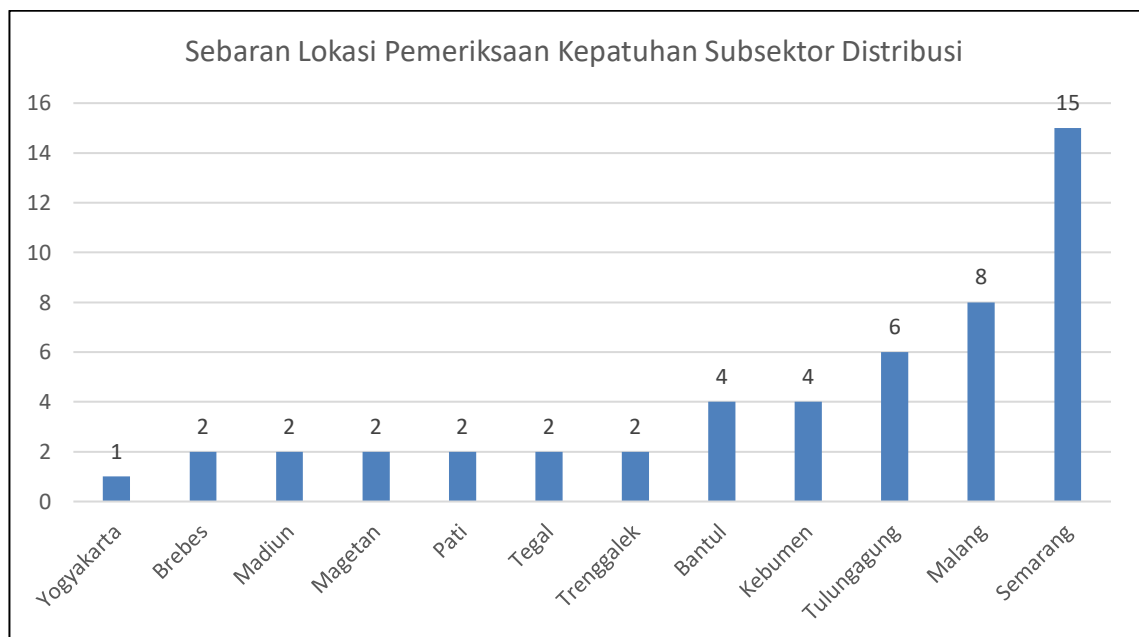
Nilai capaian kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan diperoleh dari pengawasan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan sebagai berikut:

Tabel 12. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh pengawas perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	-Surat Pemberitahuan -SPT -Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	-Berita Acara Pemeriksaan -Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap ketertelusuran (*traceability*) distribusi ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian kegiatan importasi ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Sebaran lokasi pemeriksaan usaha pengangkutan dan pemasaran ikan yang telah dilakukan pemeriksaan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. Grafik Lokasi Sebaran pelaku usaha pengangkutan dan pemasaran ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan

Capaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2022 sebanyak 51 pelaku usaha, yang didominasi oleh KBLI 47245 (Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan) dan 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan). Sekitar 12 pelaku usaha telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha sub sektor penangkutan dan pemasaran ikan, sedangkan sisanya masih harus melengkapi kewajiban standar sertifikat yang belum terpenuhi. Selanjutnya telah di rekomendasikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi seluruh syarat perizinan berusaha.

Bahwa dalam mendukung capaian Sub IKU ini diperlukan anggaran sebesar Rp.97.214.468,- atau sebesar 99,44%. dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 97.759.000,- Jumlah Anggaran tersebut telah di kurangi terkena *Automatic Adjustment (AA)* sebesar Rp. 81.241.000,- dari RP.179.000.000,- atau sebesar 45.00%. sesuai kebijakan pemerintah terkait pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan pembahasan 4 Sub IKU diatas pada tahun 2022 capain Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sebesar 100%, dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Pengukuran persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 4 (empat) pemeriksaan kepatuhan subsektor perikanan, antara lain:

1. Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan;
2. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidaya ikan;
3. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan;
4. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan.

Secara umum pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, dengan melakukan kegiatan supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara UPT dengan Satuan Pengawas dan Wilayah Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi;

2. Pemerintah pusat dan daerah telah aktif dalam penggalakan sosialisasi peraturan dan kebijakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung;
3. Telah diselenggarakan Bimtek untuk peningkatan kompetensi para pengawas perikanan dan pengawas kelautan, baik Bimtek secara luring maupun daring; serta
4. Pelaku usaha patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Apabila di dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dan 2021, maka capaian IKU Ke-2 ini selalu mencapai target yang ditentukan sebesar 100 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dari tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu memenuhi target. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Hal ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Perbandingan capaian IKU Ke-2 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020 - 2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-2 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100	100	100	100	100

Apabila di dibandingkan antara presentase pencapaian Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis tahun 2022 lingkup Ditjen PSDKP, maka perbandingan tersebut dapat di lihat pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan pencapaian IKU Ke-2 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%

5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

Sebanyak 33 personil pengawas perikanan di Stasiun PSDKP Cilacap melaksanakan tugas pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan di 3 (tiga) provinsi, yaitu: Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Cilacap kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 51 Orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengoptimalan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pengawas perikanan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

3. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” di identifikasikan ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-3 “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP”**, dengan target sebesar 87%. Salah satu tools yang digunakan adalah “Form Keaktifan POKMASWAS” yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke (setiap UPT/DKP Provinsi).

Pembinaan terhadap POKMASWAS dilakukan dengan menyesuaikan rencana aksi UPT Stasiun PSDKP Cilacap. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada “Form Keaktifan POKMASWAS” kepada Direktorat POA. Setiap Pokmawas yang dianggap aktif bilamana telah melaporkan kegiatan pembinaan dengan melampirkan Form Pembinaan yang dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto/video.

Setelah dilakukan perhitungan, capaian IKU Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dan perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.

Tabel 15. Perbandingan capaian IKU Ke-3 Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T
1	IKU Ke-3 Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	-	-	-	-	87	100	-

Capaian IKU Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP pada tahun 2022 adalah 100%, capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 87%. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU Ke-3 adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi;
2. Kegiatan pembinaan pokmaswas dilakukan secara efektif, sehingga masyarakat langsung dapat memahami perannya sebagai pokmaswas;
3. Pembinaan melibatkan narasumber ahli dari Ditjen PSDKP; dan
4. Telah dilaksanakannya supervisi dengan koordinator pokmaswas pada setiap lokasi.

Namun IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga IKU yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 merupakan jenis IKU yang berbeda. Pada tahun sebelumnya dan juga pada Renstra 2020-2024 IKU terkait POKMASWAS berbunyi "Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap", sehingga perhitungan, data dan kegiatan yang dilakukan berbeda.

Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS sampai dengan tahun 2022 telah dilaksanakan di 14 (empat belas) lokasi yaitu di Kabupaten/Kota Blitar, Nganjuk, Wonosobo, Kebumen, Wonogiri, Pacitan, Madiun, Cilacap, Magelang, Banyumas, dan Pati. Pada awal tahun 2022 Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan alokasi distribusi sebanyak 11 lokasi pembinaan Pokmaswas yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun pada pertengahan tahun 2022 Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan penambahan alokasi distribusi menjadi 14 lokasi pembinaan Pokmaswas.

Sedangkan dalam pelaksanaan capaian IKU ini antara organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada Tabel 17 berikut:

Tabel 16. Perbandingan pencapaian IKU Ke-3 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	87	100	114,94%
2	Stasiun PSDKP Biak	87	120	137,93%
3	Stasiun PSDKP Ambon	87	100	114,94%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	87	120	137,93%
6	Stasiun PSDKP Belawan	87	100	114,94%
7	Stasiun PSDKP Kupang	87	100	114,94%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	87	120	120,00%

Dalam mendukung kegiatan pembinaan terhadap pokmaswas diperlukan anggaran sebesar Rp.690.696.392,- atau 99,99%, dari total anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.690.785.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pembinaan terhadap pokmaswas di 14 lokasi.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas dalam upaya meningkatkan peran Pokmaswas yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PSDKP. Koordinasi yang dilakukan meliputi permohonan Narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas.

4. Sasaran Kegiatan 3.2 : Terselenggaranya Operasi Armada SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3.2 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”, maka SK 3.2 tersebut diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: **IKU Ke-4 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas, IKU Ke-5 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas**, serta **IKU Ke-6 Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP**. Setelah dilakukan perhitungan, capaian IKU Ke-4, IKU Ke-5, dan IKU-6 beserta perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 18 berikut.

Tabel 17. Perbandingan capaian IKU Ke-4, IKU Ke-5 dan IKU Ke-6

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T
1	IKU Ke-4 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	-	-	-	-	85	85,58	-
2	IKU Ke-5 Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	-	-	-	-	85	100	-
3	IKU Ke-6 Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	-	-	-	-	90	100	-

Capaian IKU Ke-4 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas pada tahun 2022 adalah 85,58, pencapaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 85. Hal yang menyebabkan keberhasilan kinerja operasi kapal pengawas yakni penjadwalan dan pemetaan lokasi pengawasan yang terskema, sehingga capaian kinerja dapat berjalan secara efisien. Dukungan anggaran juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas kinerja kapal pengawas dalam melakukan pengawasan.

Capaian IKU Ke-5 Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas pada tahun 2022 adalah 100, pencapaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 85. Hal yang menyebabkan keberhasilan Kinerja Operasi *Speedboat* yakni penjadwalan dan pemetaan lokasi pengawasan yang terskema, sehingga capaian kinerja dapat berjalan secara efisien. Dukungan anggaran juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas kinerja kapal pengawas dalam melakukan pengawasan.

Capaian IKU Ke-6 Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP sebesar 100, pencapaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 85. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah adanya monitoring dan penjadwalan dalam pemenuhan logistik armada pengawas, serta pelaporan sisa dan kebutuhan armada yang terintegrasi, sehingga capaian kinerja dapat berjalan secara efektif. Dukungan anggaran juga sangat berpengaruh terhadap skema pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP.

Ketiga IKU tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan 2020 maupun dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya

perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. Ketiga IKU ini merupakan IKU baru yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

IKU yang berkaitan dengan kegiatan kapal pengawas, speedboat serta pemenuhan logistik pada Renstra 2020-2024 adalah: (1) “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap”, (2) “Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)”, dan (3) “Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)”. Perbedaan antara ketiga IKU tersebut dengan IKU yang terdapat pada Renstra 2020-2024 didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan.

Penjelasan masing-masing IKU pada SK 3.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif adalah sebagai berikut:

IKU Ke-4 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa (bobot 20%);
- 2) Persentase *Coverage Area* Pengawasan (bobot 15%);
- 3) Persentase Capaian Hari Operasi (bobot 15%);
- 4) Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan (bobot 10%);
- 5) Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku *IUU Fishing* (bobot 10%);
- 6) Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (bobot 10%);
- 7) Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal (bobot 10%);
- 8) Jumlah kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR (bobot 5%); dan
- 9) Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, *destructive fishing* dan pelanggaran kelautan lainnya (bobot 5%).

Kategori Penilaian Kinerja sebagai berikut:

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik

Pengukuran IKU indeks kinerja operasi kapal pengawas diperoleh dari perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif diatas melalui operasi yang telah dilaksanakan dengan dukungan kapal pengawas sebanyak 1 (satu) unit, yaitu KP. Hiu 04 dengan periode operasi tahun 2022.

Pada awal tahun perencanaan, kegiatan operasi kapal pengawas ditargetkan sejumlah 90 hari operasi. Namun pada tahun berjalan adanya kebijakan meningkatnya harga bahan bakar menyebabkan target hari operasi kapal pengawas berkurang menjadi 38 hari operasi. Total kapal perikanan yang diperiksa di laut sebanyak 38 unit kapal perikanan, dengan uraian sebagai berikut:

1. 30 unit kapal memiliki dokumen lengkap dan diizinkan untuk melanjutkan pelayaran; serta
2. 8 unit kapal tidak memiliki dokumen lengkap, sehingga di Adhock ke pelabuhan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas merupakan IKU baru pada tahun 2022 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada Tahun 2021. Pengukuran capaian untuk IKU ke-4 ini dilakukan pada Semester I dan Semester II tahun 2022.

Dalam mendukung kegiatan operasi kapal pengawas diperlukan anggaran sebesar Rp.2.814.742.224,- atau 100%, dari total anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.2.814.746.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dukungan operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut telah dikurangi dengan anggaran yang terkena *Automatic Adjustment (AA)* sebesar Rp.813.571.000,- sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19.

Stasiun PSDKP Cilacap memiliki wilayah kerja yang luas terdiri dari 2 (dua) WPP NRI yaitu WPP NRI 712 (Laut Jawa) dan WPP NRI 573 (Samudera Hindia) dimana perlu dukungan kapal pengawas yang memiliki daya jelajah serta jangkauan yang luas (Tipe \geq 42 meter) untuk ditempatkan di bagian selatan jawa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 1 (satu) unit kapal pengawas dalam mendukung kegiatan operasi belum efisien karena belum semua wilayah perairan dapat terjangkau. Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSKDP sebagai berikut: Tabel 18. Perbandingan pencapaian IKU Ke-4 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	85	85,58	100,68%
2	Stasiun PSDKP Biak	85	120	141,17%
3	Stasiun PSDKP Ambon	85	92,91	109,30%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	85	94	110,58%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	85	92,99	109,40%
6	Stasiun PSDKP Belawan	85	89,7	105,53%
7	Stasiun PSDKP Kupang	85	90	105,88%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	85	95,33	112,15%

IKU Ke-5 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa (bobot 25%);
- 2) Persentase *Coverage Area* Pengawasan (bobot 25%);
- 3) Persentase Capaian Hari Operasi (bobot 25%);
- 4) Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku *IUU Fishing* (bobot 15%);
- 5) Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (bobot 10%);

Kategori Penilaian Kinerja sebagai berikut:

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik

Pengukuran IKU indeks kinerja operasi speedboat pengawas diperoleh dari perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif diatas melalui operasi yang telah dilaksanakan dengan dukungan speedboat pengawas sebanyak 8 (delapan) unit,

yaitu Marlin 03, Marlin 09, Dolphin 29, Napoleon 12, Napoleon 33, Napoleon 34, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat dengan periode operasi tahun 2022. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada tahun 2021 maupun dengan Renstra 2020-2024. Pengukuran capaian untuk IKU ke-4 ini dilakukan pada Semester I dan Semester II tahun 2022.

Pada awal tahun perencanaan, kegiatan operasi speedboat pengawas ditargetkan dengan rata-rata 35 hari operasi dari 8 speedboat pengawas. Namun pada tahun berjalan adanya kebijakan peningkatan harga bahan bakar menyebabkan target hari operasi kapal pengawas berkurang menjadi rata-rata 15 hari operasi. Total kapal perikanan yang diperiksa di laut sebanyak 215 unit kapal perikanan, dengan uraian pada Tabel 20 berikut:

Tabel 19. Capaian Hari Operasi dan Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa oleh Speedboat/RIB/Rubberboat Stasiun PSDKP Cilacap

No	Speedboat/ Rib/ Rubber Boat	Total Hari Operasi	Total Jam Operasi	Kapal yang Diperiksa	Realisasi Jarak Tempun (NM)
1	Napoleon 012	15	75	37	303,87
2	Napoleon 033	11	60	13	560
3	Napoleon 034	6	30	12	220
4	Dolphin 029	24	60	46	685
5	Marlin 03	15	77	19	655.08
6	Marlin 09	18	75	35	330.98
7	Rigid Inflatable Boat	20	100	30	555.2
8	Rubber Boat	15	78	43	305
Total		124	555	235	

Dalam mendukung kegiatan operasi *speedboat* pengawas diperlukan anggaran sebesar Rp.486,892,335,- atau 99,44%, dari total anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. Rp.489,649,000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dukungan operasi *speedboat* pengawas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut telah dikurangi dengan anggaran yang terkena *Automatic Adjustment (AA)* sebesar Rp.719.166.000,- sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19.

Stasiun PSDKP Cilacap didukung oleh 6 unit speedboat pengawas, 1 unit Rigid Inflatable Boat, serta 1 unit Rubber Boat yang digunakan dalam pengawasan

dengan cakupan <12 mil laut. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan dukungan speedboat pengawas tersebut sudah efisien. Perbandingan capaian IKU Kinerja Operasi Speedboat Pengawas dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Perbandingan pencapaian IKU Ke-5 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	85	100	117,64%
2	Stasiun PSDKP Biak	85	116,51	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	85	89,75	105,58%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	85	100	117,64%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	85	88,50	104,11%
6	Stasiun PSDKP Belawan	85	92,13	108,38%
7	Stasiun PSDKP Kupang	85	97	114,11%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	85	99,14	116,63%

IKU Ke-6 Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan logistik kapal dan pemenuhan logistik personel.

Logistik kapal terdiri dari :

- 1) Bahan Bakar Minyak/BBM (bobot 30%); dan
- 2) Pelumas (bobot 20%).

Logistik Personel terdiri dari :

- 1) Bahan Makanan (bobot 30%);
- 2) Air Tawar (bobot 15%); dan
- 3) Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck dan Mesin) (bobot 5%).

Kategori Penilaian Pemenuhan Logistik

No	Nilai Interval Indeks Pemenuhan Logistik	Score	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP
1	0 - 25	D	Tidak Terpenuhi
2	26 - 50	C	Kurang Terpenuhi
3	51 - 75	B	Terpenuhi
4	76 - 100	A	Sangat Terpenuhi

IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada tahun 2021 dan 2020 maupun dengan Renstra 2020-2024. Pengukuran capaian untuk IKU ke-6 ini dilakukan pada Semester I dan Semester II tahun 2022.

Dalam mendukung kegiatan pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP diperlukan anggaran sebesar Rp.1.469.580.000,- atau 100%, dari total anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.1.469.580.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut telah dikurangi dengan anggaran yang terkena *Automatic Adjustment (AA)* sebesar Rp.2.583.078.000,- sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19. Perbandingan capaian IKU Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Perbandingan pencapaian IKU Ke-6 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	90	100	111,11%
2	Stasiun PSDKP Biak	90	100	111,11%
3	Stasiun PSDKP Ambon	90	90	100,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	90	90	100,00%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	90	100	111,11%
6	Stasiun PSDKP Belawan	90	100	111,11%
7	Stasiun PSDKP Kupang	90	90	100,00%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	90	100	111,11%

5. Sasaran Kegiatan 3.3 : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian SK3.3 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU Ke-7 “Presentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)”** dan **IKU Ke-8 “Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP”**. Adapun Capaian IKU Ke-7 dan

Ke-8 dan perbandingannya dengan capaian tahun sebelumnya dan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 23 berikut.

Tabel 22. Perbandingan capaian IKU Ke-7 dan IKU Ke-8

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T
1	IKU Ke-7 Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	-	-	-	-	100	100	-
2	IKU Ke-8 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	-	-	-	-	100	100	-

Capaian IKU Ke-7 Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP tahun 2022 adalah 100%, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan adanya kegiatan monitoring rutin pada kegiatan pembangunan, sehingga capaian kinerja dapat berjalan secara efisien. Dukungan anggaran juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP. Capaian IKU Ke-8 Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP adalah 100%, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah kegiatan perawatan rutin sarana dan prasarana pengawasan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, adanya mekanisme perawatan darurat untuk kerusakan tidak terduga, dan adanya kegiatan monitoring untuk setiap sarana prasarana setelah digunakan, sehingga capaian kinerja dapat berjalan secara efektif. Dukungan anggaran juga sangat berpengaruh terhadap penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP.

Kedua IKU tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan 2020 maupun dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU tersebut merupakan IKU baru yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

IKU yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana pada Renstra 2020-2024 adalah: (1) “Jumlah speedboat pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (unit)”, (2) “Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (unit)” dan (3) “Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (unit)”. Perbedaan antara kedua IKU tersebut dengan IKU yang terdapat pada Renstra 2020-2024 didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Penjelasan Pencapaian IKU dari SK 3.3 sebagai berikut:

IKU Ke-7 Presentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Sarana Pengawasan SDKP meliputi armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Target pengadaan sarana pengawasan utama Stasiun SDKP Cilacap yaitu pembangunan konstruksi/fisik pos pengawasan Stasiun PSDKP Cilacap sebanyak 1 (satu) unit, dimana pembangunannya dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun anggaran 2022.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian pembangunan sebesar 100% pada tahun 2022 . Capaian pada IKU ini telah memenuhi target 100% pada tanggal 1 November 2022 dengan telah di tandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Stasiun PSDKP Cilacap dengan pihak luar selaku penyedia jasa pembangunan Pos Pengawasan PSDKP Cilacap. Berikut perbandingan capaian IKU Pemenuhan Presentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP sebagai berikut

Tabel 23. Perbandingan pencapaian IKU Ke-7 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%

Dalam mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP diperlukan anggaran sebesar 4.961.985.920 atau 99,99%, dari total anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar

Rp.5.000.000.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP berupa kantor Stasiun PSDKP Cilacap yang beralamat di Banyusrep, Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

IKU Ke-8 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP adalah jumlah sarana pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Direktorat POA/UPT PSDKP. Sarana Pengawasan yang dimiliki Stasiun PSDKP Cilacap meliputi: 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 8 (delapan) unit Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat.

Perawatan sarana pengawasan SDKP terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Pelaksanaan kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Periode pelaporan untuk IKU ini dilaksanakan pada akhir tahun berkenaan (tahunan).

Pada tahun 2022 pelaksanaan kegiatan perawatan untuk mendukung IKU Ke-8 ini telah selesai dilaksanakan terhadap 1 unit Kapal Pengawas dan 8 unit Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat. Kegiatan perawatan ini berperan penting dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran operasi/patroli yang dilakukan oleh Kapal Pengawas dan Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, sehingga seluruh unit dapat beroperasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan patroli pada tahun berjalan. Rincian perawatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian kegiatan perawatan pada IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

No	Kapal Pengawas/Speedboat/ Rib/ Rubber Boat	Jenis Perawatan yang Dilakukan
1	KP. Hiu 04	Perawatan Rutin Bulanan, Docking, Pengadaan Suku Cadang Main Engine Volvo, Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu (Perkins), Perbaikan Darurat Main Engine, Perbaikan Blower, Perawatan Darurat GO Auxiliary Engine
2	Napoleon 012	Perawatan Rutin Bulanan, Perawatan Darurat, Perbaikan Darurat GO Main Engine
3	Napoleon 033	Perawatan Rutin Bulanan, Perawatan Darurat
4	Napoleon 034	Perawatan Rutin Bulanan, Perawatan Darurat, Perbaikan Darurat GO Main Engine
5	Dolphin 029	Perawatan Rutin Bulanan, Perawatan Darurat
6	Marlin 03	Perawatan Rutin Bulanan, Perawatan Darurat
7	Marlin 09	Perawatan Rutin Bulanan, Perawatan Darurat, Perbaikan Darurat Kemudi
8	Rigid Inflatable Boat	Perawatan Rutin Bulanan, Perawatan Darurat
9	Rubber Boat	Perawatan Rutin Bulanan

IKU ini merupakan IKU yang telah ada sejak tahun 2021 dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka capaian pada kedua tahun ini sama-sama mencapai target 100%. Sedangkan dalam pelaksanaan capaian IKU Presentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP antara organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Perbandingan pencapaian IKU Ke-8 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

Dalam mendukung kegiatan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP diperlukan anggaran sebesar Rp.1.776.367.501,- atau 99,75%, dari total anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.1.780.875.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut telah dikurangi dengan anggaran yang terkena *Automatic Adjustment (AA)* sebesar Rp.659.055.000,- sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19.

6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif

Capaian IKU pada sasaran kegiatan Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dapat dilihat pada Tabel 27 sebagai berikut:

Tabel 26. Capaian IKU pada SK 4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022	
		TARGET	CAPAIAN
1	IKU Ke-9 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	75%	80
2	IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Cilacap	46,50%	50
3	IKU Ke-11 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	46,50%	50
4	IKU Ke-12 Persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80%	100

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK4.1 sebagai berikut:

1. IKU Ke-9 Persentase efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Persentase efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan IKU yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, didasari oleh tahapan-tahapan proses penyidikan mulai dari tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). IKU ini mengacu pada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Capaian IKU Persentase efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2022 adalah sebesar sebesar 90%, capaian ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 75%. Hal yang mempengaruhi keberhasilan

pencapaian IKU ini adalah Penyidik Pegawai Negei Sipil (PPNS) Stasiun PSDKP Cilacap memiliki kompetensi yang mumpuni karena sering melakukan Bimtek yang akan berpengaruh terhadap kinerja penyelesaian kasus, serta telah dibangunnya koordinasi yang baik antara PPNS dengan instansi terkait (Kejakasaan) maupun pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus. Stasiun PSDKP Cilacap menangani penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak 2 kasus, hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 27. Kasus Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	Prakara	Tersangka	Perkembangan Kasus	Nilai Capain
1	KM. Margarena-1	Rudi Ananto dan Arifin Wibowo	Tahap II Surat Pengantar dan BA	100
2	KM. Margarena-1	Topik	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka dan Penyusunan Resume	80

Capaian IKU Persentase efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, tahun 2021 dan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 28 berikut:

Tabel 28. Perbandingan capaian IKU Ke-9 Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020 - 2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100	100	75	90	100

Capaian IKU Ke-9 dari tahun 2020 sampai dengan 2022 telah mencapai dari target yang di tentukan. Perbedaan terdapat ada pada tahun 2022, dimana antara target dan realisasi terdapat peningkatan sebesar 15%. Presentase capaian Stasiun PSDKP Cilacap apabila di bandingkan dengan organisasi sejenis dalam

lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2022 dapat di lihat pada Tabel 30 berikut:

Tabel 29. Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	90	120,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
3	Stasiun PSDKP Ambon	93	93	100,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	93	97,5	104,83%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	93	100	107,53%
6	Stasiun PSDKP Belawan	93	100	107,53%
7	Stasiun PSDKP Kupang	93	95	102,51%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	93	100	107,53%

Bahwa dalam mendukung capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap diperlukan anggaran sebesar Rp. 159.445.329,- atau sebesar 98.59 %. dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan rencana aksi sebesar Rp. 161.721.000 , -.

2. IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan IKU yang berkaitan dengan perkembangan tahapan penanganan barang bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan, yang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti. Kegiatan penanganan barang bukti dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

Capaian IKU persentase efektivitas penyelesaian penanganan barang bukti lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, capaian tersebut sudah memenuhi dari target yang telah di tentukan sebelumnya yaitu 46,5%. Hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IKU ini adalah Penyidik Pegawai Negei Sipil (PPNS) Stasiun PSDKP Cilacap memiliki kompetensi yang mumpuni karena sering melakukan Bimtek yang akan berpengaruh terhadap kinerja penyelesaian kasus, serta telah dibangunnya koordinasi yang baik antara PPNS dengan instansi terkait (Kejakasaan) maupun

pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus. Pencapaian IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Cilacap apabila di bandingkan dengan tahun sebelumnya dan renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30. Perbandingan capaian IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020 - 2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.	-	-	93	100	46,5	100	93

Apabila di bandingkan Capaian IKU ini pada tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dan Renstra 2020-2024, setiap tahun tetap mencapai target yang di tentukan. Dapat dilihat capaian IKU ini dari tahun 2021 sebesar 100 % dengan target yang di tentukan sebesar 93%, Sedangkan tahun 2022 capaian iku sebesar 100 % dan target yang di tentukan 46,5%, sehingga tahun 2022 Stasiun PSDKP Cilacap capaian tahunan melebihi 53,5% dari target yang di tentukan. Presentase capaian Stasiun PSDKP Cilacap di bandingkan dengan organisasi sejenis dalam lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2022 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	93	100	107,53%
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
3	Stasiun PSDKP Ambon	93	93	100,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	93	97,5	104,83%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	93	100	107,53%
6	Stasiun PSDKP Belawan	93	100	107,53%
7	Stasiun PSDKP Kupang	93	100	107,53%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	93	100	107,53%

Bahwa dalam mendukung capaian penyelesaian penanganan barbuk dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sebesar Rp. 80.818.820,- dari total anggaran Rp. 82.056.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,49%.

3. Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan IKU yang berkaitan dengan perkembangan tahapan penanganan dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan, yang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP. Kegiatan penanganan awak kapal TPKP dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

Capaian IKU persentase efektivitas penyelesaian penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan pada tahun 2022 adalah sebesar 66,7%, capaian tersebut sudah memenuhi dari target yang telah di tentukan sebelumnya yaitu 46,5%. Hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IKU ini adalah Penyidik Pegawai Negei Sipil (PPNS) Stasiun PSDKP Cilacap memiliki kompetensi yang mumpuni karena sering melakukan Bimtek yang akan berpengaruh terhadap kinerja penyelesaian kasus, serta telah dibangunnya koordinasi yang baik antara PPNS dengan instansi terkait (Kejakasaan) maupun pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus. Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap apabila di bandingkan tahun sebelumnya dan renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32. Perbandingan capaian IKU Ke-11 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T
1	IKU Ke-11 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.	-	-	-	-	46,5	66,7	93

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan 2020, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU baru yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Presentase capaian

Stasiun PSDKP Cilacap di bandingkan dengan organisasi sejenis dalam lingkup Ditjen PSDKP pada tahun 2022 dapat di lihat pada Tabel 34 berikut:

Tabel 33. Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	46,5	66,7	120,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
3	Stasiun PSDKP Ambon	93	93	100,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	93	97,5	104,83%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	93	98	105,73%
6	Stasiun PSDKP Belawan	93	100	107,53%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	93	100	107,53%
8	Stasiun PSDKP Kupang	93	100	107,53%

Bahwa dalam mendukung capaian penyelesaian Persentase Penyelesaian Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sebesar Rp. 6.810.000,- dari total anggaran Rp. 6.810.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100%.

4. Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.

Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif merupakan IKU yang dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Capaian efektivitas pengenaan sanksi administratif pada Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2022 adalah sebesar 100%, capaian tersebut sudah memenuhi dari target yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 80%. Hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IKU ini adalah Penyidik Pegawai Negei Sipil (PPNS) Stasiun PSDKP Cilacap memiliki kompetensi yang mumpuni karena sering melakukan Bimtek yang akan berpengaruh terhadap kinerja penyelesaian kasus, serta telah dibangunnya koordinasi yang baik antara PPNS dengan instansi terkait (Kejakasaan) maupun pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus.

Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Cilacap apabila di bandingkan tahun sebelumnya dan renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34. Perbandingan capaian IKU Ke-12 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
		T	R	T	R	T	R	T
1	IKU Ke-12 Persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.	-	-	-	-	80	100	-

Pengukuran capaian untuk IKU ke-12 ini dilakukan pada Semester I dan Semester II tahun 2022. Namun capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU yang baru dimunculkan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 Stasiun PSDKP Cilacap telah menyelesaikan 15 kasus dan memberikan denda administratif kepada para pelanggar. Denda administratif tersebut sudah di setorkan kepada kas negara. Perbandingan pencapaian IKU efektivitas pengenaan sanksi administratif dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 36 berikut.

Tabel 35. Persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif lingkup organisasi setara ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120%
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120%
8	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120%

Bahwa dalam mendukung capaian penyelesaian kegiatan ini adalah sebesar Rp.43.634.895,- atau sebesar 97.45 %, dari anggaran telah dialokasikan dalam Rencana Aksi sebesar Rp.44.775.000,-. Jumlah anggaran tersebut telah dikurangi oleh anggaran yang terkena *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp. 15.225.000,- dari Rp.60.000.000,- atau sebesar 25,37%, sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan Covid-19.

7. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian SK 5.1 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 13 (tiga belas) IKU. IKU tersebut terdiri dari: (1) IKU Ke-13 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks); (2) IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks) (3) IKU Ke-15 Nilai WBK Stasiun PSDKP Cilacap (nilai); (4) IKU Ke-16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks); (5) IKU Ke-17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai); (6) IKU Ke-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja; (7) IKU Ke-19 Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi); (8) IKU Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%); (9) IKU Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%); (10) IKU Ke-22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%); (11) IKU Ke-23 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%); (12) IKU Ke-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%) (nilai); (13) IKU Ke-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai). Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK5.1 sebagai berikut:

IKU Ke- 13 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Cilacap, dalam hal ini adalah layanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO).

Tabel 36. Perbandingan capaian IKU Ke-13 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-13 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	80	82,87	80	81,83	80	87,90	80

Capaian IKU Ke-13 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan pada Tahun 2022 adalah 87,90, capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 80. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SLO yaitu sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang bertujuan untuk merumuskan standar pelayanan bersama dengan pengguna jasa layanan, sehingga pelayanan yang dilakukan sudah memenuhi harapan dan kebutuhan para pengguna jasa.
2. Jadwal pelayanan tersedia dari hari Senin sampai dengan Minggu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
3. Adanya inovasi atau mekanisme baru untuk pelayanan permohonan SLO melalui aplikasi e-riksa (www.eslo.kkp.go.id). Walaupun pada awal peluncurannya di tanggal 1 November 2022 masih terdapat banyak keluhan dari para pengguna jasa terkait cara penggunaannya, namun seiring waktu berjalan hingga diakhir tahun 2022 aplikasi ini dapat meningkatkan/mempercepat waktu pelayanan, tentunya didukung dengan peran pengawas perikanan yang senantiasa mengawal penerapannya dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pengguna jasa.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021, maka telah terjadi peningkatan sebesar 6,07, sedangkan perbandingan dengan target Renstra 2020-2024 menunjukkan peningkatan sebesar 7,90. Rincian pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan SLO dapat dilihat pada gambar 7 sebagai berikut:



Gambar 7. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah pelaksanaan survey terhadap 80 orang responden pengguna layanan SLO di Stasiun PSDKP Cilacap pada periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2022, dengan latar Pendidikan dari SD, SMP, SMA, DIII, S1 dan S2. Survey kepuasan masyarakat/pengguna layanan dilakukan setiap Triwulan, sehingga sampai dengan periode ini IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan telah selesai dilaksanakan.

Perbandingan Pencapaian IKU Ke-13 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 38 sebagai berikut:

Tabel 37. Perbandingan pencapaian IKU Ke-13 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	87,90	109,88%
2	Stasiun PSDKP Biak	80	92,31	115,38%
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	90,87	113,58%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	91,79	114,73%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	90,67	113,33%

6	Stasiun PSDKP Belawan	80	87,53	109,41%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	94,12	117,65%
8	Stasiun PSDKP Kupang	80	90,57	113,21%

IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Cilacap, dalam hal ini adalah layanan penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan).

Perbandingan capaian IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 39 berikut:

Tabel 38. Perbandingan capaian IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T
IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	-	-	80	90,34	80	98,31	-

Capaian IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) pada tahun 2022 adalah 98,31, capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal-hal yang menyebabkan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) LVHPI yaitu sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang bertujuan untuk merumuskan standar pelayanan bersama dengan pengguna jasa layanan, sehingga pelayanan yang dilakukan sudah memenuhi harapan dan kebutuhan para pengguna jasa.
2. Jadwal pelayanan tersedia dari hari Senin sampai dengan Minggu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
3. Walaupun setelah diterbitkannya Permen KP No 10 Tahun 2021 permohonan LVHPI berkurang, karena saat ini LVHPI bukan merupakan salah satu syarat utama untuk penerbitan SHTI, namun pelayanan tetap dilakukan dengan

maksimal untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa yang masih melakukan permohonan.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun 2021, maka telah terjadi peningkatan sebesar 7,97. Namun capaian pada IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan indikator kinerja yang baru dimunculkan pada tahun 2021. Rincian pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan LVHPI dapat dilihat pada gambar 8 sebagai berikut:



Gambar 8. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah pelaksanaan survey terhadap 21 orang responden pengguna layanan LVHPI di Stasiun PSDKP Cilacap pada periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2022, dengan latar Pendidikan dari SD, SMP, SMA, DIII, S1 dan S2. Survey kepuasan masyarakat/pengguna layanan dilakukan setiap Triwulan, sehingga sampai dengan periode ini IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) telah selesai dilaksanakan.

Perbandingan Pencapaian IKU Ke-14 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 40 sebagai berikut:

Tabel 39. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	98,31	120,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	90,88	113,60%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	91,03	113,78%
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	90,92	113,65%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	90,35	112,93%
8	Stasiun PSDKP Kupang	80	94,58	118,22%

IKU Ke-15 Nilai WBK Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Komponen penilaian untuk IKU Ke-15 yaitu Nilai WBK UPT Stasiun PSDKP Cilacap meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Unit kerja yang ditetapkan sebagai 'menuju WBK' harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0; dan
4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN dan RB/Tim Penilai Internal KKP. Perbandingan capaian IKU Ke-15 Nilai WBK UPT Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 41 sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan capaian IKU Ke-15 Nilai WBK UPT Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-15 Nilai WBK UPT Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	75	78,56	75	90,08	-

Pelaksanaan penilaian WBK Stasiun PSDKP Cilacap telah dilaksanakan pada bulan Juli oleh Inspektur V Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Surat Dinas nomor B.150/ITJ.5/KP.730/VII/2022 perihal Hasil Pemantauan Zona Integritas Lingkup KKP Tahun 2022, Stasiun PSDKP Cilacap telah memenuhi syarat predikat menuju WBK dan diusulkan untuk penilaian WBK Nasional Kemenpan RB dengan capaian nilai 90,08. IKU ke-15 ini tercapai melebihi dari target yang di tetapkan sebelumnya sebesar 75.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun 2021, maka telah terjadi peningkatan sebesar 11,52. Namun capaian pada IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan indikator kinerja yang baru dimunculkan pada tahun 2021. Hal-hal yang menyebabkan meningkatnya Nilai WBK Stasiun PSDKP Cilacap yaitu sebagai berikut:

1. Stasiun PSDKP Cilacap telah menerapkan inovasi pelayanan CEKATAN untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa; dan
2. Hasil penilaian administrasi dari Kemen PAN dan RB Nomor B/09/PW.03/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2022, menunjukkan bahwa penyusunan data dukung serta hasil penilaian untuk Stasiun PSDKP Cilacap memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam Tim Penilai Nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan dalam penyusunan laporan dan pengarsipan data yang menyebabkan hasil nilai Stasiun PSDKP Cilacap tinggi.

Perbandingan Pencapaian IKU Ke-15 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 41 sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	90,08	120,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	75	-	-
3	Stasiun PSDKP Ambon	75	-	-
4	Stasiun PSDKP Tahuna	75	89,91	119,88%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	83,31	111,08%
6	Stasiun PSDKP Belawan	75	77,87	102,82%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	75	89,69	119,58%
8	Stasiun PSDKP Kupang	75	90,39	120,00%

IKU Ke-16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU Ke-16 Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap memiliki nilai target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 77. Perhitungan capaiannya dilakukan dengan metode pembobotan terhadap 4 variabel, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%), variabel ini berkaitan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK pangkat terakhir yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG;
2. Kompetensi (bobot 40%), variabel ini berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim, Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar;
3. Kinerja (bobot 30%), variabel ini berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN; dan
4. Disiplin (bobot 5%), variabel ini berkenaan dengan pernah/tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Perbandingan antara capaian IKU Ke-16 dengan tahun sebelumnya serta dengan Renstra 2020-2024 dapat di lihat pada Tabel 43 berikut:

Tabel 42. Perbandingan capaian IKU Ke-16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	72	75,26	73	75,18	77	80,17	72

IKU Ke-16 ini diukur dengan periode pengukuran setiap Semester pada tahun berkenaan, pada Semester I tahun 2022 targetnya adalah 70 sedangkan pada Semester II tahun 2022 targetnya adalah 77. Capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 80,17, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 3,17 dari target yang telah ditentukan sebelumnya.

Hal-hal yang menyebabkan meningkatnya IP ASN Stasiun PSDKP Cilacap yaitu sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan sosialisasi terkait kepegawaian, utamanya untuk meningkatkan pemahaman para pegawai Stasiun PSDKP Cilacap terkait pentingnya mengikuti seminar dan Diklat 20 JP sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan IP ASN; serta
2. Stasiun PSDKP Cilacap juga telah beberapa kali melaksanakan seminar secara mandiri dengan bekerjasama dengan KC. Mandiri Area Purwokerto untuk meningkatkan profesionalitas pegawai dalam melayani para pengguna jasa.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang besarnya adalah 75,18, maka IKU Ke-16 ini mengalami peningkatan sebesar 4,99. Peningkatan juga terjadi apabila dilakukan perbandingan antara capaian tahun 2022 dengan Renstra 2020-2024, yakni sebesar 8,17. Perbandingan Pencapaian IKU Ke-16 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 44 sebagai berikut:

Tabel 43. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	77	80,17	104,12%
2	Stasiun PSDKP Biak	77	82,02	106,51%
3	Stasiun PSDKP Ambon	77	80	103,89%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	77	80,17	104,12%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	77	80,99	105,18%
6	Stasiun PSDKP Belawan	77	82,17	106,71%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	77	80,07	104,80%
8	Stasiun PSDKP Kupang	77	80,36	104,36%

IKU ke-17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan bentuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

1. Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja;
2. Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan; serta
3. Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerja)

Pengukuran capaian IKU Ke-17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap ditargetkan dalam satu tahun dengan bobot nilai 90. Perhitungan capaian IKU ini pada tahun 2022 didapatkan dari hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh internal PSDKP maupun Biro Perencanaan KKP. IKU ini merupakan IKU baru yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target dan capaian IKU ke-17 pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan target Renstra 2020-2024 dapat di lihat pada Tabel 45 berikut:

Tabel 44. Perbandingan capaian IKU Ke-18 Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	90	92,37	90	97,52	90	97,28	-

Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Ditjen PSDKP nomor: 1835/PSDKP.1/TU.210/XI/2022 tanggal 14 November 2022 hal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2022 lingkup Ditjen PSDKP, Stasiun PSDKP Cilacap memperoleh nilai hasil rekonsiliasi kinerja sebesar 97,28 dari target yang di tetapkan pada tahun 2022 sebesar 90. Capaian antara tahun 2020, 2021 dan 2022 sama-sama mengalami kenaikan dari target. Namun capaian pada IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU.

Perbandingan Pencapaian IKU Ke-17 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 46 sebagai berikut:

Tabel 45. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	90	97,28	108,09%
2	Stasiun PSDKP Biak	90	96,29	106,99%
3	Stasiun PSDKP Ambon	90	95,92	106,58%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	90	97,20	108,00%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	90	98,04	108,93%
6	Stasiun PSDKP Belawan	90	98,04	108,93%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	90	97,03	107,81%
8	Stasiun PSDKP Kupang	90	96	106,67%

IKU Ke-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Budaya kerja yang melandasi seluruh kegiatan pegawai Stasiun PSDKP Cilacap adalah ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan PILAR (Profesional, Integitas, Loyalitas, Inovatif dan Sinergi) Ditjen PSDKP. Namun selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga menerapkan budaya kerja CETAR, yang merupakan akronim dari Ceria Tanpa Korupsi.

Target untuk IKU Ke-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP pada tahun 2022 adalah sebesar 21, yang diperoleh dari: (1) Nilai implementasi program budaya kerja, yang merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker; dan (2) Nilai implementasi program budaya kerja yang diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Target dan capaian IKU ke-18 pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada Tabel 47 berikut:

Tabel 46. Perbandingan capaian IKU Ke-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	21	26,17	-

Stasiun PSDKP Cilacap memperoleh Nilai Implementasi Program Budaya Kerja sebesar 26,17 dari target yang di tetapkan pada tahun 2022 sebesar 21. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja ASN BerAkhlak, PILAR Ditjen PSDKP dan CETAR kepada seluruh pegawai Stasiun PSDKP Cilacap, sehingga seluruh pegawai dapat memahami dan menerapkannya;
2. Aspek-aspek budaya kerja yang lain sudah diterapkan pada kegiatan pekerjaan sehari-hari, contoh: ketepatan waktu saat menghadiri pertemuan, menerapkan 5R, menggunakan aplikasi (elayar, epegawai, dll) dalam melaksanakan pekerjaan, dan sebagainya.

Capaian pada IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU yang baru dimunculkan pada tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada Tabel 48 sebagai berikut:

Tabel 47. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	21	26,17	120,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	21	25,84	120,00%
3	Stasiun PSDKP Ambon	21	23,18	110,38%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	21	27,34	120,00%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	21	23,69	112,80%
6	Stasiun PSDKP Belawan	21	26,67	120,00%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	21	26,85	120,00%
8	Stasiun PSDKP Kupang	21	25,02	119,14%

IKU Ke-19 Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kriteria inovasi yang perlu dipenuhi adalah (1) Memiliki kebaruan; (2) Efektif; (3) Bermanfaat; (4) Dapat ditransfer/direplikasi; dan (5) Berkelanjutan. Setiap Satuan Kerja wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi. Pada tahun 2022 Stasiun PSDKP Cilacap di bebaskan 1 (satu) inovasi yang harus dihasilkan sebagai kinerja organisasi. Target dan capaian IKU ke-19 pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat dilihat pada Tabel 49 berikut:

Tabel 48. Perbandingan capaian IKU Ke-19 Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-19 Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	-	-	1	1	1	1	-

Pada tahun 2021 maupun tahun 2022 Stasiun PSDKP Cilacap telah menghasilkan masing-masing 1 (satu) inovasi pelayanan publik. Pada tahun 2022 ini inovasi yang telah di hasilkan disebut dengan “Mendoan Anget” yang merupakan akronim dari Menghitung Denda Administratif Bidang Perikanan dan Kelautan dengan Obyektif, Transparan, Akuntabel dengan Cepat.

Inovasi ini telah dipaparkan/disosialisasikan pada kegiatan Lomba Inovasi Ditjen PSDKP Tahun 2022 dan juga telah mendapatkan nilai dari Tim Penilai baik eksternal (Praktisi Inovasi Nasional) maupun internal (Inspektorat II, BRSDM, dan Pusatin). Sesuai dengan Berita Acara yang telah ditetapkan oleh para Tim Penilai, nilai yang didapatkan oleh Stasiun PSDKP Cilacap adalah 80,91 dengan predikat *Gold*.

Hal-hal yang dapat meningkatkan pelayanan Mendoan Anget adalah sebagai berikut:

- a. Kesiapan SDM Pengawas Perikanan, PPNS Perikanan dan Operator Mendoan Anget; serta
- b. Kelengkapan alat pengolah data (laptop, printer, jaringan internet).

Perbandingan Pencapaian IKU ke-20 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 50 berikut.

Tabel 49. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	1	1	100,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	1	1	100,00%
3	Stasiun PSDKP Ambon	1	1	100,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	1	1	100,00%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100,00%
6	Stasiun PSDKP Belawan	1	1	100,00%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	1	1	100,00%
8	Stasiun PSDKP Kupang	1	1	100,00%

IKU Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

IKU Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan

pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pengukuran/penilaian capaian pada IKU ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 dengan target nilai 75%. Target dan Capaian IKU ke-21 pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada Tabel 38 berikut:

Tabel 50. Perbandingan capaian IKU Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	72,5	100	75	100	-

Capaian IKU Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar 100% dari target yang di tetapkan pada tahun 2022 sebesar 75%. Seluruh pengelolaan barang milik negara telah sesuai dengan rencana perencanaan belanja modal tahun 2022. Keberhasilan pencapaian IKU ini dikarenakan pelaksanaan pengelolaan BMN di Stasiun PSDKP Cilacap telah sesuai dan memenuhi seluruh syarat yang berlaku.

Capaian IKU ini antara tahun 2021 dan tahun 2022 telah sama-sama melebihi target. Sedangkan untuk perbandingan dengan Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan

penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU yang baru dimunculkan pada tahun 2021. Perbandingan pencapaian IKU Ke-20 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 52 berikut.

Tabel 51. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	100	120,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	75	100	120,00%
3	Stasiun PSDKP Ambon	75	100	120,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	75	100	120,00%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	100	120,00%
6	Stasiun PSDKP Belawan	75	100	120,00%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	75	100	120,00%
8	Stasiun PSDKP Kupang	75	100	120,00%

IKU Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

IKU Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa lingkup unit kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (bobot 20%); serta
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 30%).

Pengukuran/penilaian capaian pada IKU ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 dengan target nilai 75%. Target dan Capaian IKU ke-22 pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada Tabel 53 berikut:

Tabel 52. Perbandingan capaian IKU Ke-22 Tingkat Kepatuhan PBJ Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan PBJ Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	72,5	95	75	100	-

Capaian IKU Ke-21 Tingkat Kepatuhan PBJ Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar 100%, capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 75%. Seluruh pengadaan barang dan jasa telah sesuai rencana perencanaan belanja modal tahun 2022. Keberhasilan pencapaian IKU ini dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Stasiun PSDKP Cilacap telah sesuai dan memenuhi seluruh syarat yang berlaku.

Capaian IKU ini antara tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5%. Sedangkan untuk perbandingan dengan Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU yang baru dimunculkan pada tahun 2021. Perbandingan Pencapaian IKU Ke-21 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 54 berikut.

Tabel 53. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	100	120,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	75	100	120,00%
3	Stasiun PSDKP Ambon	75	100	120,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	75	100	120,00%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	100	120,00%
6	Stasiun PSDKP Belawan	75	100	120,00%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	75	100	120,00%
8	Stasiun PSDKP Kupang	75	96,29	120,00%

IKU Ke-22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan aplikasi Bitrix24.com dengan target 86% pertriwulan pada tahun 2022.

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

1. Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
2. Keikutsertaan: Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Btrix; dan
3. Keaktifan: Mengupload dokumentasi kegiatan/informasi yang dilengkapi dengan foto atau video (Eselon II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H.

Target dan Capaian IKU ke-22 pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada Tabel 55 berikut:

Tabel 54. Perbandingan capaian IKU Ke-22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	82	100	82	100	86	98,06	82

Berdasarkan Surat Dinas dari Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.223/PSDKP.1/RC.610/I/2023 dengan hal Capaian Manajemen Pengetahuan Terstandar Ditjen PSKDP 2022, hasil capaian IKU Ke-23 Stasiun PSDKP Cilacap adalah 98,06%, melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu 86%. Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Cilacap diantaranya berupa: Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, Profil Stasiun PSDKP Cilacap/Satuan Pengawas (Satwas) SDKP/Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Cilacap, serta Update Data Penerbitan SLO.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada tahun 2021, maka pada kedua tahun ini sama-sama telah melebihi dari target. Perbandingan dengan Renstra 2020-2024 juga menunjukkan adanya peningkatan sebesar 16,06. Pencapaian IKU Ke-22 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 56 berikut.

Tabel 55. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	86	98,06	114,02%
2	Stasiun PSDKP Biak	86	100	116,27%
3	Stasiun PSDKP Ambon	86	99,03	115,15%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	86	100	116,27%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	86	95,49	111,03%
6	Stasiun PSDKP Belawan	86	95,69	111,26%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	86	84,44	98,18%
8	Stasiun PSDKP Kupang	86	97,57	113,45%

IKU Ke-23 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Capaian pada IKU Ke-23 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab).

Berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP No B.255/PSDKP.1/TU.140/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2022”, hasil seluruh rekomendasi untuk Stasiun PSDKP Cilacap telah ditindak lanjuti (100%). Target dan Capaian IKU ke-23 pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada Tabel 57 berikut:

Tabel 56. Perbandingan capaian IKU Ke-23 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-23 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	-	-	70	100	-

Capaian IKU Ke-23 pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 70%. Seluruh rekomendasi telah di tindaklanjuti oleh Stasiun PSDKP Cilacap.

Namun capaian IKU Ke-23 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU yang baru dimunculkan pada tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Perbandingan Pencapaian IKU Ke-23 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 58 berikut.

Tabel 57. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	70	100	120,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	70	100	120,00%
3	Stasiun PSDKP Ambon	70	100	120,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	70	100	120,00%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	70	100	120,00%
6	Stasiun PSDKP Belawan	70	100	120,00%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	70	100	120,00%
8	Stasiun PSDKP Kupang	70	100	120,00%

IKU Ke-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu: Capaian Output, Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, serta Dispensasi SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan.

Pengukuran dan penarikan data untuk capaian pada IKU IKPA dilakukan pada data sebagai berikut:

- a. Pengukuran Capain IKU IKPA dilakukan pada Semester I dan II; dan
- b. Penarikan Data Capaian IKPA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan langkah-langkah akhir tahun berjalan yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Target dan capaian IKU ke-24 pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada Tabel 59 berikut:

Tabel 58. Perbandingan capaian IKU Ke-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	88	98,95	89	97,95	89	94,44	88

Capaian IKU Ke-24 pada tahun 2022 adalah sebesar 94,44, capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 89. Apabila dilakukan perbandingan antara tahun 2022 dengan tahun sebelumnya yaitu 2020 dan 2021, maka capaian pada ketiga tahun ini sama-sama telah melebihi dari target. Begitupula dengan perbandingan antara capaian tahun 2022 dengan Renstra 2020-2024, telah terjadi peningkatan sebesar 6,44. Sedangkan perbandingan pencapaian IKU Ke-24 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 60 berikut.

Tabel 59. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	89	94,44	106,11%
2	Stasiun PSDKP Biak	89	96,68	108,62%
3	Stasiun PSDKP Ambon	89	93,65	105,22%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	89	98,19	110,32%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	89	93,39	104,93%
6	Stasiun PSDKP Belawan	89	93,70	105,28%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	89	96,08	107,95%
8	Stasiun PSDKP Kupang	89	97,16	109,16%

IK Ke-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL yang diinput oleh Stasiun PSDKP Cilacap melalui aplikasi SMART DJA (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Target dan capaian IKU ke-25 pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada Tabel 61 berikut:

Tabel 60. Perbandingan capaian IKU Ke-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU Ke-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	86	93,93	81	85,36	-

Berdasarkan data yang peroleh melalui aplikasi OMSPAN periode tanggal 13 Januari 2022 dan juga Nota Dinas dari Kepala Biro Keuangan nomor 91/SJ.2/RC.610/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2022, Stasiun PSDKP Cilacap memperoleh nilai NKA sebesar 85,36, dari target

yang telah ditetapkan yaitu 81, hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan sebesar 4,36 poin.

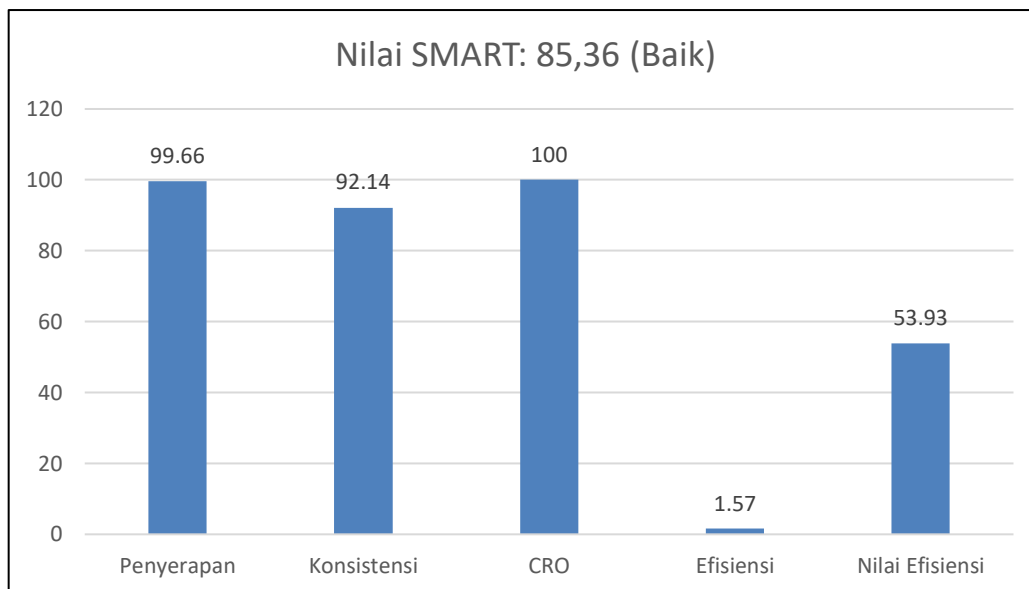
Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021, maka pada kedua tahun ini sama-sama telah melebihi target yang telah ditetapkan. Namun capaian IKU ke-25 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU yang baru dimunculkan pada tahun 2021. Perbandingan pencapaian IKU Ke-25 dengan organisasi sejenis/setara tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 62 berikut.

Tabel 61. Perbandingan pencapaian IKU dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada tahun 2022

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	81	85,36	105,38%
2	Stasiun PSDKP Biak	81	85,99	106,16%
3	Stasiun PSDKP Ambon	81	86,82	107,18%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	81	91,43	112,87%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	81	84,46	104,27%
6	Stasiun PSDKP Belawan	81	86,25	106,48%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	81	92,93	114,72%
8	Stasiun PSDKP Kupang	81	90,43	111,64%

C. Efisiensi

Pengukuran untuk nilai efisiensi anggaran dilakukan dengan menginput data realisasi oleh Stasiun PSDKP Cilacap melalui aplikasi SMART DJA (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Hasil efisiensi anggaran pada Stasiun PSDKP Cilacap adalah 1,57 dan dapat dilihat pada Gambar 9 sebagai berikut:



Gambar 9. Efisiensi melalui aplikasi SMART DJA

Uraian terkait efisiensi yang telah dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik yang di laksanakan pada bulan November tahun 2022, tidak seluruh pegawai lingkup Satwas/Wilker yang diundang ke kantor pusat Stasiun PSDKP Cilacap. Namun disediakan juga sesi melalui *zoom meeting*, sehingga dapat mengurangi alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut; dan
2. Proses pemindahan kantor Stasiun PSDKP Cilacap dari kantor lama ke kantor baru masih mempertahankan hampir seluruh barang yang dapat digunakan, sehingga tidak menambah anggaran yang terlalu besar.

D. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada Tahun 2022 sesuai DIPA Nomor: DS: 0870-9850-3290-9590 tanggal 17 November 2021, adalah sebesar **28.087.186.000,-** (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), namun pada bulan Desember tahun 2022 telah dilakukan penghapusan anggaran *Automatic Adjustment* sehingga anggaran yang dikelola Stasiun PSDKP Cilacap menjadi **Rp.25.768.557.000,-** (Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran tahun 2022 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar **99,66%** atau

sebesar **Rp.25.681.868.836,-** (Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 63 berikut:

Tabel 62. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap periode Januari-Desember 2022

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	2350 Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	PAGU	0	5,633,986,000	5,104,776,000	0	0	0	0	0	0	10,738,762,000
		REALISASI	0.00%	5,626,689,452 (99.87%)	5,103,994,920 (99.98%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10,730,684,372 (99.92%)
2	2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	PAGU	0	206,496,000	0	0	0	0	0	0	0	206,496,000
		REALISASI	0.00%	203,079,215 (98.35%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	203,079,215 (98.35%)
3	2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	PAGU	0	120,947,000	0	0	0	0	0	0	0	120,947,000
		REALISASI	0.00%	120,388,536 (99.54%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	120,388,536 (99.54%)
4	2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	PAGU	0	909,556,000	0	0	0	0	0	0	0	909,556,000
		REALISASI	0.00%	896,668,615 (98.58%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	896,668,615 (98.58%)
5	2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	PAGU	9,460,946,000	4,181,850,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	13,792,796,000
		REALISASI	9,410,324,626 (99.46%)	4,169,694,935 (99.71%)	149,946,130 (99.96%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13,729,965,691 (99.54%)
GRAND TOTAL		PAGU	9,460,946,000	11,052,835,000	5,254,776,000	0	0	0	0	0	0	25,768,557,000
		REALISASI	9,410,324,626 (99.46%)	11,016,520,753 (99.67%)	5,253,941,050 (99.98%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	25,680,786,429 (99.66%)
		SISA	50,621,374	36,314,247	834,950	0	0	0	0	0	0	87,770,571

Sumber: Om Span Stasiun PSDKP Cilacap per 10 Januari 2023

E. Penghargaan

Selama tahun anggaran berjalan (TA. 2022), Stasiun PSDKP telah mendapatkan beberapa penghargaan baik dari instansi internal maupun instansi eksternal. Perhargaan yang diterima meliputi penghargaan untuk kinerja anggaran, peningkatan inovasi publik, dan lainnya, baik untuk keseluruhan organisasi maupun individu pegawai Stasiun PSDKP Cilacap. Penghargaan yang diterima dapat dilihat pada Tabel 64 sebagai berikut.

Tabel 63. Penghargaan yang Diterima Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2022

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
1	Satker Terbaik Pertama dalam Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Semester I Tahun 2022	KPPN Cilacap	Stasiun PSDKP Cilacap
2	Juara I Lomba Inovasi GKM kategori UPT Tahun 2022	Ditjen PSDKP	Stasiun PSDKP Cilacap

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2022 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun anggaran 2022, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Cilacap berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Indikator Kinerja Utama yang dilakukan pengukuran pada tahun 2022 sebanyak 25 Indikator kinerja, semua IKU Stasiun PSDKP Cilacap dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mendukung program strategis KKP 2022-2024, yaitu dukungan pengawasan penangkapan ikan terukur dan dukungan pengawasan prioritas perikanan budidaya;
2. Maraknya pelanggaran SPKP di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap; dan
3. Turunnya capaian IKU untuk nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).

Rencana tindak lanjut:

1. Koordinasi dengan Eselon II teknis;
2. Melakukan kegiatan verifikasi SPKP di setiap wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap dan berkoordinasi dengan Eselon II teknis;

3. Menyiapkan kelengkapan dokumen Rincian Penarikan Dana (RPD) untuk memantau penganggaran dan pelaksanaan kegiatan, serta mengatur kegiatan penganggaran berdasarkan 8 kategori penilaian IKPA.

LAMPIRAN

1. Lampiran Perjanjian Kinerja Revisi Akhir

	<p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346 WEBSITE: www.djperkp.kkp.go.id EMAIL: djperkp@kkp.go.id</p>
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
<p>Nama : Erik Sostenes Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Selanjutnya disebut pihak pertama</p>	
<p>Nama : Adin Nurawaluddin Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua</p>	
<p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p>Jakarta, 16 Desember 2022</p>	
<p>Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Pihak Pertama Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p>
 Adin Nurawaluddin	 Erik Sostenes
<p>..</p>	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
STASIUN PSDKP CILACAP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautanLingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	87
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	85
		ISK3.2.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	85
		ISK3.2.3	Indeks Pemanuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
		ISK3.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	75
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkupStasiun PSDKP Cilacap (%)	46,5
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	46,5
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	80

-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DIT.JEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Lalk Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	90
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		ISK5.1.7	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	86
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	81

..

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	120.947.000
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	909.556.000
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	10.738.762.000
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	206.496.000
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	13.792.796.000
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	
Total Anggaran		25.768.557.000

Jakarta, 16 Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap


Erik Sostenes

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Awal



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3619070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3620346
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Erik Sostenes**
Jabatan : **Kepala Stasiun PSDKP Cilacap**



Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

<p>Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Adin Nurawaluddin</p>	<p>Pihak Pertama Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p>  <p>Erik Sostenes</p>
--	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
STASIUN PSDKP CILACAP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,5
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87,5
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian pembangunan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
		ISK3.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	74
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	90
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		ISK5.1.7	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)	1
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	86
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	81

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	202.247.000
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.535.732.000
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	12.877.057.000
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	272.435.000
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	13.199.715.000
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	
Total Anggaran		28.087.186.000

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap



Erik Sostenes